

## **PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI HARUS MEMPUNYAI VISI DAN MISI YANG JELAS**

Keadaan masa depan sukar direncanakan namun dapat dipastikan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan merupakan sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi atau bahkan kemajuan kehidupan masyarakat di sebagian besar negara di dunia. Ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan akan menghasilkan hal baru dengan kelajuan yang sangat pesat, baik yang berupa barang, jasa, layanan komunikasi, maupun tatacara berekonomi, dan globalisasi dalam berbagai bentuk kini mengubah wajah kehidupan di seluruh dunia.

Secara garis besar, tantangan dan permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, dalam menghadapi area pasar bebas Asean saat ini dan Asia Pasifik 2020 salah satu aspek yang amat rawan yang perlu dipersiapkan adalah peningkatan kemampuan bangsa untuk bersaing dalam bidang jasa. *Kedua*, bahwa dipenghujung abad ini, kita dihadapkan pada masalah global dengan semakin terbatasnya kekayaan sumberdaya alam (SDA) di satu pihak dan semakin tingginya kebutuhan manusia di lain pihak. *Ketiga*, masyarakat dunia secara keseluruhan saat ini dihadapkan pada masalah semakin melebarnya kesenjangan antara kelompok negara maju yang memiliki penguasaan IPTEK di satu pihak dan kelompok negara miskin dengan penguasaan IPTEK di pihak lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang cepat dan bersifat global tersebut akan berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa, terutama karena: 1) lulusan perguruan tinggi akan memposisikan diri atau diposisikan masyarakat sebagai calon pemimpin, baik di perusahaan, masyarakat, maupun di instansi pemerintah; dan 2) produk jasa dan pemikiran perguruan tinggi dianggap berperan sangat menentukan bagi konsep pembangunan bangsa. Namun demikian, terjadinya perkembangan yang sangat cepat di dunia global, antara lain terjadinya krisis multidimensi, perubahan kebijakan, cepat berubahnya trend global dan semakin terbatasnya dana pendidikan serta kenyataan bahwa daya saing lulusan perguruan

tinggi di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi negara-negara lain. Untuk itu, Dirjen Dikti kemudian mengeluarkan kebijakan yang dinamakan sebagai *Higher Education Long Time Strategies* (HELTS).

Kebijakan Dirjen Dikti tersebut menurut hemat penulis untuk saat ini masih bisa diselaraskan untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya. Ada tiga unsur utama yang menjadi prioritas dalam HELTS, yaitu: 1) otonomi akademik dan pengelolaan, 2) kesehatan organisasi dan 3) daya saing bangsa. Namun demikian, otonomi yang diberikan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan selama tidak disertai dengan adanya suatu kontrol. Untuk itu HELTS mensyaratkan adanya suatu **organisasi perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel**. Sehingga untuk dapat meraih status otonom, perguruan tinggi harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: **1) diterapkannya kualitas akademik yang baik. 2) kemampuan yang baik dalam mengelola sumberdaya, termasuk mampu mencegah kebangkrutan, dan 3) adanya kepemimpinan yang memungkinkan terjadinya transformasi organisasi**.

Untuk mengantisipasi seperti yang saya kemukakan di atas, sebaiknya pimpinan suatu perguruan tinggi harus taat kepada STATUTA, jangan hanya STATUTA dijadikan tameng untuk mempertahankan suatu kepentingan. Namun yang sangat penting adalah bahwa seorang pemimpin harus mempunyai *visi* dan *misi* yang jelas sehingga dapat **menampung dan menjalankan aspirasi civitas akademisnya serta menciptakan iklim akademis yang kondusif dalam rangka memajukan perguruan tinggi yang dipimpin sesuai dengan program-programnya**. Secara garis besar bahwa program yang direncanakan oleh seorang pemimpin perguruan tinggi sebaiknya harus: 1) memiliki relevansi dengan *core business* perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan misi yang ditetapkan, 3) merupakan program kegiatan yang bersifat *sustainable* atau terjaga keberlangsungannya, 4) memiliki manfaat sosial dan kemasyarakatan serta 5) tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.